

BAB II

KONDISI UMUM KOTA CIREBON

Dalam Bab II ini akan membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan Kota Cirebon yang meliputi empat bahasan utama, yaitu (1) fakta dan analisis (2) analisis SWOT dan (3) prediksi kondisi umum Kota Cirebon.

2.1 FAKTA DAN ANALISIS

Dibawah ini akan dibahas atau dianalisis hal-hal yang berkaitan dengan aspek keseluruhan kehidupan yang terjadi pada masyarakat Kota Cirebon, dimulai dari aspek geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan SDA, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah dan penataan ruang

2.1.1 Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup

Kota Cirebon terletak di Timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 108,33° dan 6,41° Lintang Selatan pada Pantai Utara Pulau Jawa bagian Barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Wilayah administratif Kota Cirebon seluas 37,35 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

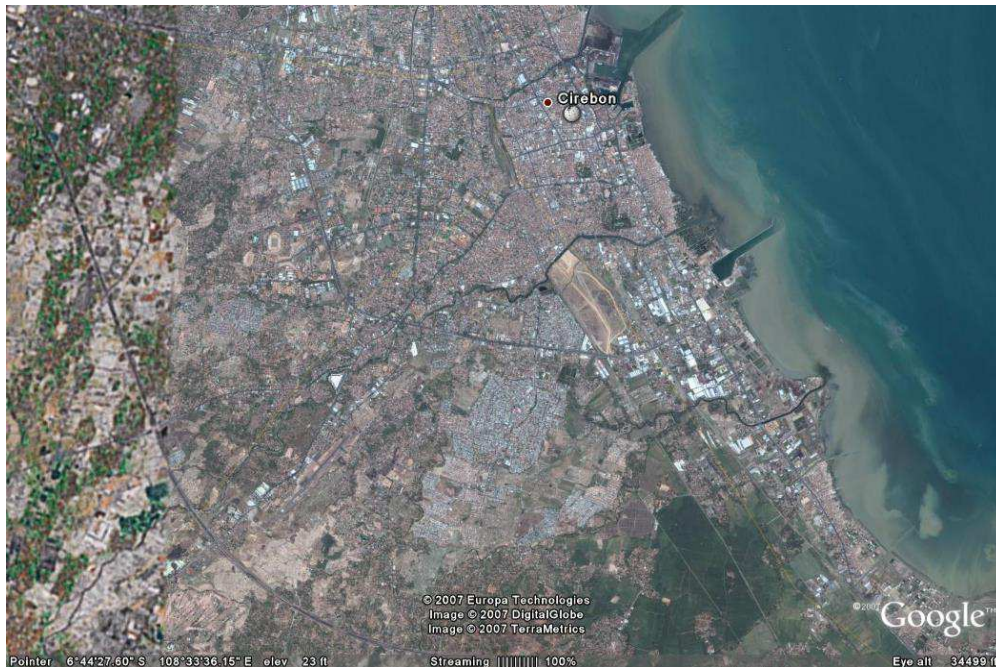
- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA CIREBON 2005-2025**

Gambar 2.1
Letak Kota Cirebon



Gambar 2.2
Kota Cirebon



Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di Wilayah Selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbangun ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi berkisar antara 23,4°C - 33,6°C dengan curah hujan per tahun sebanyak 1.732 mm, dan 116 hari hujan atau sebanyak 31,78 persen per tahun. Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan.

Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol yang berasal dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis *vegetasi*.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah bahwa Kota Cirebon kurang memiliki ruang publik yang asri dan terbuka sebagai tempat dimana masyarakat dari berbagai kalangan bisa bersosialisasi dalam suasana yang guyub. Taman kota dan kawasan olahraga sebagai salah satu bentuk ruang publik tersebut, saat ini cenderung menjadi barang langka.

Persoalan lainnya yang sekarang menjadi sangat krusial adalah kerusakan lingkungan akibat penambangan galian C di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti. Bukan hanya penanganan untuk mereklamasi kondisi lingkungan yang harus dilakukan, tetapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dikegiatan penambangan tersebut.

1. Topografi

Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

2. Tanah

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas :

- (1) Regosol coklat kelabu, asosiasi regosol kelabu
- (2) Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu
- (3) Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu
- (4) Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu, dan latosol
- (5) Asosiasi mediteran coklat dan litosol
- (6) Latosol coklat kemerahan

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 macam, yaitu:

- (1) Kedalaman 0--30 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti
- (2) Kedalaman 30--60 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi
- (3) Kedalaman lebih dari 60 meter : Terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas

3. Air

Potensi air Kota Cirebon meliputi; air tanah dangkal, air tanah dalam, air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5 – 10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20 – 30 meter untuk dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrusi air laut.

Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai. Kota Cirebon memiliki 4 sistem sungai, yaitu Sistem Kedung Pane / Tangkil, Sistem Sukalila, Sistem Kesunean, dan Sistem Kalijaga.

Adapun kondisi air laut, khususnya di kawasan pantai berwarna coklat karena pengaruh pendangkalan oleh lumpur yang dibawa oleh 4 sistem sungai dan sungai-sungai dari wilayah Kabupaten Cirebon.

Khusus untuk air bersih sebagai konsumsi rumah tangga, Kota Cirebon masih tergantung pada Kabupaten Kuningan. Hal ini dikarenakan sumber air yang digunakan berada di wilayah Kabupaten Kuningan. Karena masalah air dikategorikan sebagai bidang pelayanan dasar, diperlukan solusi berupa kerjasama antar daerah atau kerjasama amalgamasi atau pengelolaan air laut melalui teknologi pengelolaan air bersih yang mutakhir.

4. Udara/Angin

Wilayah Kota Cirebon termasuk dalam iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Musim penghujan jatuh pada bulan Oktober-April/Mei, dan musim kemarau jatuh pada bulan Juni-September. Musim pancaroba terjadi pada bulan April dan November. Rata-rata curah hujan tahunan di Kota Cirebon ± 1.732 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 116 hari, ini berarti sebesar ± 31.78 persen hari dalam setahun yang mengalami hari hujan.

Udara panas dengan temperatur maksimum terjadi pada bulan September hingga Oktober, yaitu $\pm 32^{\circ}$ C, sedangkan temperatur terendah terjadi pada bulan Juni-Juli, yaitu $\pm 24^{\circ}$ C. Rata-rata temperatur yaitu 28° C. Adapun kelembaban udara berkisar antara 48 – 94 persen, dengan fluktuasi cukup besar setiap musimnya.

5. Lingkungan Hidup

Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisinya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan.

Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, Harjamukti, wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisinya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut adalah :

- (1) Kawasan bekas galian C di Argasunya. Kerusakan lingkungan di kawasan ini ditandai dengan adanya lubang-lubang galian yang kedalamannya melebihi muka air tanah sehingga menurunkan produksi air tanah di kawasan itu, tidak adanya zona penyangga penambangan sehingga sangat membahayakan bagi penduduk setempat, dan tidak adanya tanaman yang dikembalikan sebagai tanah penutup. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena kawasan bekas Galian C berada pada kawasan yang paling tinggi dari seluruh kawasan Kota Cirebon, sehingga kawasan ini sebenarnya memiliki fungsi untuk menampung cadangan air tanah yang berasal dari air hujan. Tantangan pemulihan bekas Galian C ini secara fisik juga harus diimbangi dengan penyediaan alternatif lapangan kerja bagi penduduk setempat mengingat selama ini mereka bekerja sebagai penambang galian C. Sampai saat ini belum ada alternatif pekerjaan yang cocok yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat.
- (2) Kawasan persimpangan jalan di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto, Jl. Karanggetas, Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal Bus Harjamukti, dan Perempatan Pemuda – By Pass memiliki tingkat kebisingan yang sudah melebihi ambang batas yang diperkenankan. Kondisi ini disebabkan volume kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Tantangan ke depan jika tidak ada pengaturan keseimbangan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan, maka akan timbul permasalahan lalu lintas dan lingkungan seperti kemacetan dan kebisingan.

- (3) Kondisi kualitas udara ambien ternyata menunjukkan untuk parameter debu di beberapa kawasan telah melebihi ambang batas yaitu di sekitar Jl. Siliawangi – Kantor Bakorwil dan area sekitar Jl. Karang Getas depan Toserba Asia, sementara untuk parameter hydro carbon (HC) melebihi ambang batas hampir diseluruh wilayah Kota Cirebon. Kondisi ini memang berkaitan dengan penghasil hydro carbon yaitu kendaraan bermotor, pabrik, dan kawasan lainnya yang menggunakan mesin pengolah beremisi hydro carbon.
- (4) Kondisi kimia beberapa aliran sungai di Kota Cirebon ternyata menunjukkan parameter yang telah melebihi ambang batas. Parameter tersebut adalah :
 - (a) Amoniak Bebas (NH₃-N) yaitu di sungai Sipadu, Sukalila, Gang Sontong, Kedung Pane, Sigujeg, Cimanggu, dan Saluran Drainase Jl. Dr. Sudarsono.
 - (b) Deterjen yaitu di sungai Sipadu, Sukalila, Gang Sontong, Sigujeg, dan Suradinaya.
 - (c) Fecal Coli yaitu di sungai Lunyu, Kedung pagah, Cikalong, Suba, Cikenis, Kebat, Kalijaga, Kesunean, Sipadu, Sukalila, Gang Sontong, Kadung Pane, Sigujeg, Cimanggu, Banjir Kanal, dan Drainase Jl, Sudarsono.

Kondisi ini menunjukkan bahwa limbah rumah tangga pada umumnya masih dibuang ke sungai. Ini berarti bahwa masyarakat belum memiliki

kesadaran untuk merubah perilakunya dalam memelihara sungai dan menangani limbah rumah tangga.

2.1.2. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kota Cirebon selama 9 tahun terakhir (1997 – 2006) menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Selama sembilan tahun terakhir tersebut penduduk Kota Cirebon bertambah dari 253.547 jiwa menjadi 285.363 jiwa atau sebanyak 31 ribu jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk tahun 2006 adalah sebesar 7.333 jiwa/km² atau 74 jiwa/hektar. Pertumbuhan rata-rata penduduk per tahun sebanyak 1,32 persen dengan rasio jenis kelamin bertambah dari 96,84 persen menjadi 98,92 persen.

Berdasarkan sebaran penduduk, Kecamatan Harjamukti masih merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak mencapai 89,509 jiwa atau sebesar 31,37 persen, sementara jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Pekalipan yaitu sebesar 32.064 jiwa atau 15,13 persen. Adapun untuk tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Pekalipan memiliki tingkat kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 20.541 jiwa /km², sementara Kecamatan Harjamukti merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 4.960 jiwa /km².

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan :

- (1) Peningkatan jumlah penduduk rata-rata sebesar 1,3 persen pertahun menuntut konsekuensi akan penambahan ruang hidup seperti tempat tinggal, lapangan kerja, jasa pelayanan publik, dan lain sebagainya. Jika diperkirakan pertumbuhan tersebut tetap, maka 20 tahun ke depan jumlah penduduk Kota Cirebon akan bertambah menjadi 366.252 jiwa.

Dengan luas wilayah yang relatif tidak bertambah maka kepadatan penduduk per hektarnya akan bertambah menjadi 98 jiwa/hektar atau meningkat sebanyak 25 jiwa per hektar.

- (2) Jika dipetakan, sebaran penduduk Kota Cirebon lebih banyak ke wilayah selatan daripada ke wilayah utara. Hal ini terkait dengan ketersediaan daya dukung wilayah terutama lahan kosong di wilayah Selatan yang relatif lebih luas daripada di wilayah Utara yang sudah padat dengan bangunan. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena di wilayah selatan selain diperuntukkan bagi kawasan budidaya juga ada kawasan lindung yang perlu dijaga kelestariannya. Jika tidak dikendalikan, perkembangan penduduk di wilayah ini akan merambah ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung.

2.1.3. Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

1. Makro Ekonomi

Sesuai kondisi geografis dan letak wilayah kota yang berada pada jalur persimpangan arus lalu lintas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, sektor-sektor ekonomi yang berkembang lebih banyak pada bidang perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pusat-pusat perbelanjaan atau mall, perbankan dan jasa keuangan, perkantoran, serta jasa lainnya. Kota Cirebon memiliki pula infrastruktur pendukung ekonomi yang lengkap, seperti Pelabuhan Laut, Bandara, Stasiun KA penumpang dan barang, Terminal penumpang Antar Kota antar Provinsi dan kelengkapan infrastruktur lainnya (jaringan air bersih, gas, telepon, dan listrik).

Kota Cirebon juga menjadi Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon sehingga sering dijadikan tempat atau lokasi kantor-kantor cabang yang melayani seluruh Wilayah Cirebon (Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu). Kondisi ini merupakan beban tersendiri karena kondisi infrastruktur pelayanan yang ada harus menanggung beban melampaui batas wilayah administrasi kota itu sendiri.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA CIREBON 2005-2025**

Pada tabel 2.1, dapat dilihat Indikator Makro Pembangunan yang sangat di perlukan untuk menguji keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2006. Secara garis besar indikator makro pembangunan Tahun Anggaran 2006 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**TABEL 2.1.
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2006**

| No. | Indikator | Target Tahun 2006 | Kondisi Tahun 2006 | Persentase Capaian Kinerja |
|-----|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 4,68persen | 4,66persen | 99,57persen |
| 2 | PDRB per Kapita (harga konstan) | Rp.6.628.649,56 | Rp.6.274.766,00 | 94,66persen |
| 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 0,97persen | 0,97persen | 100persen |
| 4 | Jumlah keluarga miskin | 10.832 KK | 14.525 KK | 65,9persen |
| 5 | Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar | 11persen | 5,56persen | 50,54persen |
| 6 | Jumlah bayi yang meninggal / tahun | 15 bayi | 75 bayi | -300persen |
| 7 | Angka harapan hidup | 69,34 tahun | 68 tahun | 98,06persen |
| 8 | Angka Partisipasi Murni | | | |
| | a. SD/MI/PA | 93persen | 99,46persen | 106,94persen |
| | b. SLTP/MIS/PB | 93persen | 92,06persen | 98,99persen |
| | c. SLTA/MA | 89,6persen | 88,49persen | 98,76persen |
| 9 | Rata-rata lama sekolah | 9,17/tahun | 9,7/tahun | 105,78persen |
| 10 | Angka Putus Sekolah | | | |
| | a. SD/MI | 55 orang | 59 orang | 92,73persen |
| | b. SLTP/MIS | 48 orang | 84 orang | 25persen |
| | c. SLTA/MA | 164orang | 310 orang | 10,97persen |
| 11 | IPM | 73,78persen | 71,94persen | 97,50persen |

Sumber : BPS, KBPP, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja serta Dinas Kesehatan 2006

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB merupakan indikator makro yang dapat menggambarkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari berbagai aktivitas perekonomian di suatu daerah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. PDRB atas dasar harga berlaku

sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan perkembangan produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga dapat digunakan sebagai indikator inflasi atas dasar harga produsen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga dipakai sebagai ukuran laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai PDRB yang sebenarnya dari suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

PDRB Kota Cirebon pada tahun 2006 atas dasar harga berlaku mencapai angka Rp. 7,976 trilyun, sementara pada tahun sebelumnya mencapai Rp. 6,840 trilyun. Ini berarti berdasarkan harga berlaku PDRB Kota Cirebon tahun 2006 telah tumbuh sebesar 16,60 persen.

Untuk mengetahui PDRB secara riil harus dilihat dari PDRB yang didasarkan atas harga konstan dan harga yang digunakan adalah harga-harga di tahun 2000. Dengan harga konstan tahun 2000 tersebut PDRB Kota Cirebon tahun 2006 mencapai angka Rp. 5,124 trilyun sementara pada tahun 2005 mencapai angka Rp. 4,855 trilyun. Dengan membandingkan angka di kedua tahun tersebut terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2006 telah tumbuh sebesar 5,54 persen. Angka LPE ini ternyata lebih besar dari LPE tahun sebelumnya yang mencapai 4,89 persen. Peningkatan LPE sebesar 0,65 persen dari LPE tahun sebelumnya ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan di sektor bangunan, jasa-jasa dan industri pengolahan.

Melihat kondisi riil pada tahun 2006 meningkatnya pendapatan asli daerah dengan Jumlah penerimaan dari pajak daerah dari target sebesar Rp.13.585.311.174 sedangkan realisasi sebesar Rp.13.456.234.145 atau 99,04 persen. Dengan demikian kondisi pada tahun 2006 berkurangnya dari target pada riilisasi pendapatan asli daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- (a) Menurunnya pajak penerangan jalan,
- (b) Menurunnya pajak parker,
- (c) Menurunnya pajak hiburan.

Pencapaian sasaran "*Kontribusi PDRB perdagangan, hotel dan restoran meningkat*" di tahun 2006 didukung dengan nilai capaian indikator

kinerja sasaran 113,33 persen atau dengan kualifikasi Baik. Meningkatnya nilai capaian yang diperoleh disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a) Banyaknya peminat dari UKM binaan Kantor Koperasi yang mengikuti pameran promosi dan pameran produk UKM baik tingkat Propinsi maupun Nasional,

b) Banyaknya produk unggulan yang harus dipromosikan kepada daerah lain

Pencapaian sasaran *“Kontribusi PDRB Industri non migas meningkat”*, pada tahun 2006 didukung oleh nilai capaian indikator kinerja sasaran 100 persen atau dengan kualifikasi baik. Pencapaian sasaran ini melalui program *“Pengembangan Industri kecil dan menengah”*.

Pencapaian sasaran *“Kontribusi PDRB perikanan meningkat”*, pada tahun 2006 dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran 100 persen atau dengan kualifikasi baik. Pencapaian sasaran kesembilan misi kelima ini melalui program *“Pengembangan sarana dan prasarana industri perikanan dan kelautan”*.

Pencapaian sasaran *“Kontribusi PDRB peternakan dan pertanian meningkat”*, pada tahun 2006 didukung dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran 100 persen atau dengan kualifikasi baik. Pencapaian sasaran ini melalui program Jumlah Screen House dan Prosentase Kualitas Ternak dan Bahan Asal Hewan. Pencapaian sasaran berikutnya melalui program *“Pengembangan agribisnis komoditas unggulan”*.

Pencapaian sasaran *“Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan”*, didukung dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran 100 persen atau dengan kualifikasi baik. Hal ini di dukung dengan program peningkatan frekuensi Promosi Wisata Budaya di dalam dan luar daerah.

2. Lapangan Usaha

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa diantara kesembilan sektor ekonomi (lapangan usaha), sektor bangunan merupakan sektor yang angka pertumbuhannya merupakan yang paling tinggi yaitu sebesar 9,84 persen, dengan nilai tambah sebesar 333,7 milyar rupiah. Hal ini dapat terlihat dari

semakin banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun di Kota Cirebon, terutama di Kecamatan Harjamukti.

**TABEL 2.2
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) KOTA CIREBON
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2003 – 2006 (persen)**

| SEKTOR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006**) |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pertanian | 7.81 | 4.82 | 5.41 | -0.14 |
| Pertambangan | - | - | - | - |
| Industri | 3.65 | 3.45 | 0.81 | 3.83 |
| Listrik, Gas, Air Bersih | 8.72 | 6.37 | 7.18 | 4.11 |
| Bangunan | 6.22 | 6.93 | 7.24 | 9.84 |
| Perdagangan | 3.59 | 5.54 | 9.50 | 6.97 |
| Pengangkutan | 5.73 | 5.27 | 6.05 | 6.03 |
| Keuangan | 5.28 | 5.13 | 5.63 | 3.38 |
| Jasa | 4.61 | 5.12 | 5.43 | 7.81 |
| TOTAL | 4.27 | 4.66 | 4.89 | 5.54 |

***)* Angka Sementara
Sumber : PDRB Kota Cirebon

Sektor selanjutnya yang pertumbuhannya cukup besar dicapai oleh sektor jasa-jasa dengan angka pertumbuhan sebesar 7,81 persen. Pertumbuhan di sektor ini terutama didongkrak oleh subsektor jasa pemerintahan umum yang mencapai 8,44 persen dimana subsektor jasa pemerintahan umum pada tahun 2006 sebesar Rp 212.243.420.000 sedangkan tahun 2005 sebesar Rp 195.716.200.000,- sehingga laju pertumbuhannya sebesar 8,44 persen. Sektor jasa yang meliputi jasa hiburan, jasa perorangan dan rumahtangga merupakan salah satu lapangan kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup dominan di Kota Cirebon. Sektor ini memberikan nilai tambah sebesar 404,5 milyar rupiah pada tahun 2005 dan 475,9 milyar rupiah pada tahun 2006.

Urutan ketiga dalam pertumbuhan sektor ini dicapai oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 6,97 persen. Walaupun laju pertumbuhan pada sektor ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tapi nilai tambah pada sektor ini mengalami peningkatan yaitu dari 2.223 milyar rupiah pada tahun 2005 menjadi 2.657,2 milyar rupiah pada tahun 2006. Sektor ini merupakan salah satu motor penggerak ekonomi Kota Cirebon. Meningkatnya kegiatan usaha di sektor hotel dan restoran dikarenakan Kota Cirebon merupakan basis kegiatan ekonomi di wilayah III

Cirebon. Dengan didukung jumlah hotel bintang dan non bintang yang cukup banyak serta letak yang strategis Kota Cirebon menjadi pilihan bagi para pelaku ekonomi, untuk memilih sarana akomodasi. Begitupula untuk kegiatan usaha restoran, Kota Cirebon dengan banyak makanan khas seperti nasi jambang, empal gentong dan *sea food* serta makanan khas lain menjadikan usaha dibidang restoran dapat berkembang dengan pesat.

Urutan berikutnya diduduki oleh sektor angkutan dengan angka pertumbuhan sebesar 6,03 persen. Padatnya arus mobilitas angkutan orang dan barang pada tahun ini juga mewarnai pertumbuhan PDRB. Dari empat jenis angkutan umum yang ada di Kota Cirebon, angkutan rel kereta api memberikan nilai tambah sebesar 30,74 miliar rupiah dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 26,70 miliar rupiah terjadi peningkatan. Peningkatan nilai tambah kereta api disamping oleh faktor naiknya tarif kereta api juga meningkatnya jumlah pengguna sarana angkutan kereta api. Begitu pula untuk usaha angkutan jalan raya yang terdiri dari angkutan penumpang dan angkutan barang terdapat peningkatan angka PDRB. Untuk kegiatan angkutan jalan raya tercatat pada tahun 2006 menghasilkan PDRB sebesar 487,66 milyar rupiah dan 387,9 miliar rupiah pada tahun 2005. Untuk angkutan laut yang melayani angkutan bongkar muat barang dari dan ke luar Cirebon pada tahun 2006 telah menghasilkan nilai tambah sebesar 560,88 milyar rupiah dan 497,8 miliar rupiah pada tahun 2005. Adapun Kegiatan usaha yang dilakukan di Pelabuhan Cirebon meliputi angkutan batu bara, angkutan kayu, angkutan semen, angkutan pupuk dan bahan-bahan baku industri. Sedangkan jasa angkutan udara masih belum memberikan andil yang cukup berarti. Tercatat nilai tambah dari angkutan udara sebesar 33,42 juta rupiah pada tahun 2005 dan 35,64 juta rupiah pada tahun 2006. Masih rendahnya nilai tambah angkutan udara disebabkan kegiatan penerbangan melalui Bandara Penggung Cirebon masih terbatas belum ada penerbangan reguler.

Kegiatan usaha di sektor angkutan yang juga memberikan kontribusi dalam penghitungan PDRB adalah kegiatan jasa penunjang angkutan yang meliputi jasa parkir dan jasa terminal. Kegiatan di sektor ini pada tahun 2006 di Kota Cirebon menghasilkan nilai tambah sebesar 92,83 milyar rupiah dan 81,9 milyar rupiah pada tahun 2005. Meningkatnya pendapatan usaha jasa penunjang angkutan seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan

yang melakukan mobilitas didalam kota dan terminal Cirebon. Sementara itu Kegiatan usaha dibidang komunikasi semakin maju. Kemajuan dibidang komunikasi ini diwarnai oleh makin beragamnya teknologi informasi. Semula komunikasi hanya bisa dilakukan melalui telepon kabel, tetapi saat ini komunikasi dapat dilakukan dengan telepon seluler. Pada saat ini alat komunikasi ini lebih kompetitif dengan berbagai fasilitas yang tersedia serta harga relatif murah. Dengan kondisi yang demikian jumlah pengguna alat komunikasi ini makin bertambah dari waktu ke waktu. Alat komunikasi yang lainnya juga mengalami kemajuan yang cukup pesat adalah komunikasi melalui dunia maya atau internet. Saat ini usaha yang menekuni jasa internet makin banyak jumlahnya. Sebaliknya usaha komunikasi berupa warung telekomunikasi saat ini dalam kondisi yang kurang berkembang bahkan sejumlah warung telekomunikasi tidak beroperasi lagi. Meningkatnya jumlah pengguna komunikasi ini telah menjadikan nilai tambah di sub sektor komunikasi naik dari 191,5 milyar rupiah di tahun 2005 menjadi 217,9 milyar rupiah pada tahun 2006. Pada masa mendatang dengan semakin berkembangnya teknologi usaha di sektor komunikasi masih berpeluang untuk lebih meningkat.

Sektor industri mengalami pertumbuhan sebesar 3,83 persen, untuk lapangan usaha industri Kota Cirebon yang di dominasi oleh industri rokok, industri makanan ternak dan industri jaring masih menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan PDRB sektor industri pada tahun 2006 sebesar 3,83 persen sedangkan pada tahun 2005 hanya 0,81 persen.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 3,38 persen. Sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2005 yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,63 persen. Bahkan untuk sub sektor perbankan mengalami pertumbuhan negatif, sebaliknya pada sub sektor lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan (*leasing*), jasa penukaran uang (*Money Changer*), dan koperasi mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 9,68 persen pada tahun 2006 sedangkan pada tahun 2005 pertumbuhannya sebesar 6,83 persen. Semakin banyaknya lembaga yang memberikan kredit dengan uang muka rendah mendorong meningkatnya pertumbuhan sub sektor ini. Sementara itu dengan banyaknya usaha-usaha baru yang tumbuh di Kota Cirebon telah mendorong peningkatan nilai tambah pada kegiatan usaha persewaan

bangunan dan jasa perusahaan. Untuk dua jenis kegiatan ini telah terjadi pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar 9,87 persen dan 2,55 persen.

Sektor pertanian pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 0,14 persen. Penurunan ini disebabkan semakin berkurangnya lahan-lahan pertanian yang masih tersisa di Kota Cirebon. Lahan-lahan pertanian tersebut semakin banyak yang telah berubah menjadi perumahan-perumahan yang dikembangkan oleh para *developer*.

LPE berdasarkan lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. LPE Kota Cirebon tahun 2006 masing-masing adalah -0,14 persen untuk sektor primer, 4,34 untuk sektor sekunder, dan 6,54 untuk sektor tersier.

Pertumbuhan disektor primer yang mengalami penurunan sebesar 0,14 persen disebabkan karena menurunnya produksi pertanian di Kota Cirebon. Sedangkan pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 5,41 persen.

Sektor sekunder pada tahun 2006 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,34 persen. Pertumbuhan sektor ini disumbang oleh tiga sektor yaitu sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan dengan laju masing-masing sebesar 3,83 persen, 4,11 persen, dan 9,84 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan di sektor sekunder ini telah mengalami peningkatan sebesar 2,78 poin.

Sektor tersier pada tahun 2006 tumbuh sebesar 6,54 persen dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ternyata pertumbuhannya lebih rendah 1,2 poin.

Berdasarkan data PDRB yang ada, sektor sekunder dan tersier masih merupakan penggerak utama roda perekonomian Kota Cirebon. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan angka PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun atas dasar harga berlaku yang cukup besar antara sektor sekunder dan tersier dibandingkan dengan sektor primer. Dari hal tersebut dapat digambarkan bahwa basis kegiatan ekonomi Kota Cirebon tidak bersumber dari kekayaan alam yang terdapat di Kota Cirebon.

Dilihat dari komposisi nilai PDRB antara sektor primer, sekunder, dan tersier, kontribusi sektor primer masih dibawah satu persen, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Rendahnya kontribusi sektor primer mencerminkan bukan merupakan andalan untuk membangkitkan ekonomi Kota Cirebon. Sebaliknya kontribusi sektor sekunder dan tersier menunjukkan angka yang tinggi, berarti roda perekonomian Kota Cirebon separuhnya digerakkan oleh usaha perdagangan dan jasa serta industri.

A. Industri dan Perdagangan

Perindustrian merujuk kepada aktivitas pembuatan, penghasilan barang untuk perdagangan dan bukannya untuk kegunaan sendiri. Berdasarkan nilai dan bentuknya perindustrian dapat dibagi menjadi 3 jenis :

- (1) Industri Kecil
- (2) Industri Menengah
- (3) Industri Besar

Salah satu pendukung meningkatkan perekonomian masyarakat adalah keberadaan industri yang tumbuh dan berkembang di Kota Cirebon, yakni Industri Kecil dan Menengah.

Penyelenggaraan urusan Industri diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana ekonomi serta produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi” dengan tujuan :

- (1) Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan perdagangan dan jasa
- (2) Meningkatkan upaya pemasaran hasil-hasil industri kecil/ rumah tangga, perikanan, peternakan dan pertanian serta untuk mencapai sasaran :
 - (a) Meningkatnya pendapatan asli daerah
 - (b) Kontribusi PDRB Industri non migas meningkat

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum “Peningkatan peluang industri dan perdagangan”, Pemerintah Kota Cirebon selama Tahun Anggaran 2006 telah melaksanakan program Pengembangan perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Aktifitas perdagangan khususnya Perdagangan Dalam Negeri di Kota Cirebon merupakan sektor yang

dominan dibanding sektor ekonomi lainnya hal ini terlihat dari beberapa pasar tradisional, pasar modern dan ruko atau mini market di Kota Cirebon.

Perkembangan yang sangat pesat dari ketiga jenis lembaga perdagangan tersebut yaitu pada ruko atau mini market yang bermunculan di semua wilayah Kecamatan di Kota Cirebon. Perkembangan Perdagangan Dalam Negeri ditandai juga dengan banyaknya pengusaha yang mengurus legalitas usaha dalam rangka memperlancar kegiatan usaha dan terciptanya tertib usaha.

Penyelenggaraan urusan Perdagangan pada Tahun 2006 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana ekonomi serta produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi” dengan tujuan “Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perdagangan dan jasa”, serta untuk mencapai sasaran “Kontribusi PDRB perdagangan, hotel dan restoran meningkat”.

Berkenaan dengan pengembangan dan pembinaan UKM di Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon selama Tahun Anggaran 2006 telah melaksanakan program Pengembangan Industri kecil dan menengah. Dalam mencapai program tersebut diselenggarakan kegiatan :

- (1). Pengembangan Teknik produksi pembuatan tutup botol, bordir, roti/kue yang terampil dan terbina
- (2). Pelatihan Industri Kerajinan
- (3). Operasional Dekranasda Kota Cirebon
- (4). Pengembangan *Good Manufacturing*
- (5). Pengembangan Kemasan Pangan
- (6). Pengujian laboratorium mutu barang / produk IK Pangan

Dilihat dari letak geografis Kota Cirebon memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan terhadap luar negeri dalam bentuk transaksi ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor barang di Kota Cirebon sebagian besar dilakukan menggunakan jasa pelabuhan laut. Dari data pelabuhan laut Cirebon tercatat volume ekspor non migas tahun 2006 sebesar 6.695.446,72 Kg dengan nilai 11.472.468,64 US \$, 156.721,83 EURO, 86.755.275 Yen dan Rp 675.901.925,32.

B. Keuangan

APBD Kota Cirebon tahun 2006 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2006 dan penjabarannya melalui Keputusan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2006. Perubahan APBD Kota Cirebon ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2006 dan penjabarannya melalui Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2006.

Pendapatan Kota Cirebon pada tahun 2006 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 407.810.678.993,54 dapat diwujudkan sebesar Rp. 416.658.631.593,95. Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2006 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 433.360.099.517,59 dapat diwujudkan sebesar Rp. 404.110.514.918,00.

Tabel 2.3.

**Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan
Terhadap Total Pendapatan
Tahun 2006**

| No | Jenis Pendapatan | Riilisasi | Kontribusi |
|-----------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | PAD | 54.066.342.199,00 | 12,98persen |
| 2 | Dana Perimbangan | 362.592.289.395,00 | 87,02persen |
| | Jumlah | 416.658.631.594,00 | 100 ,00persen |

Pos penerimaan terbesar masih diperoleh dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar Rp. 362.592.289.395,00, penerimaan terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp 54.066.342.198,95.

Perihal Pajak Daerah pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.585.311.174,00 dapat diwujudkan sebesar Rp. 13.456.234.145,00 atau 99,05 persen; Adapun rincian Pajak Daerah terdiri atas :

1). *Pajak Hotel*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.793.661.000,00 dapat diwujudkan sebesar Rp. 1.708.109.583,00 atau 95,23persen. Riilisasi kurang dikarenakan tingkat hunian hotel menurun dan ketidakpatuhan objek wajib pajak.

2). *Pajak Restoran*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.065.000.000,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 2.080.966.615,00 atau 100,77 persen. Riilisasi lebih dikarenakan tingkat hunian naik dan potensi bertambah (tingkat kunjungan meningkat).

3). *Pajak Hiburan*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 863.100.000,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 766.711.614,00 atau 88,83persen. Riilisasi kurang dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- (a) Masyarakat sudah tidak lagi menyukai film Indonesia
- (b) Berkurangnya pertunjukan Band-Band di Cirebon karena sering terjadi tawuran/kerusuhan.
- (c) Berkurangnya pengunjung.

4). *Pajak Reklame*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.539.470.674,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 1.775.246.481,00 atau 115,32 persen. Riilisasi lebih dikarenakan telah diberlakukannya tarif baru sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2004 yang berlaku mulai 1 September 2004.

5). *Pajak Penerangan Jalan*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 6.802.831.952,00 atau 97,18 persen. Riilisasi berkurang dikarenakan : Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar listrik tepat pada waktunya

6). *Pajak Parkir*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 310.950.000,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 308.267.900,00 atau 99 ,14 persen. Riilisasi kurang dikarenakan pengunjung swalayan pada tahun 2006 menurun.

7). *Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.129.500,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 14.100.000,00 atau 107,39 persen. Riilisasi lebih dikarenakan sudah banyak pengusaha burung walet yang mematuhi peraturan untuk membayar pajak.

Mengenai Retribusi Daerah pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.785.774.940,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 6.750.457.539,00 atau 86,70 persen. Adapun rincian Retribusi Daerah terdiri atas :

1). *Retribusi Pelayanan Kesehatan*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 332.900.000 dapat diilisasikan sebesar Rp. 362.688.055,00 atau 108,95 persen;

2). *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.789.300.000,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 1.527.572.679,00 atau 85,37 persen.

3). *Retribusi Pelayanan Kependudukan*

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 398.000.000,00 dapat diilisasikan sebesar Rp. 372.568.000,00 atau 93,61 persen. Adapun sektor retribusi yang menunjang lainnya adalah :

4). *Retribusi Akte Catatan Sipil*

5). *Retribusi Pelayanan Pemakaman*

6). *Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, dll.*

Penanaman Modal di Kota Cirebon sampai dengan tahun 2006 adalah sebanyak 4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 857 orang Tenaga Kerja dan 4 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1012 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Selama Tahun 2006 Penanaman Modal di Kota Cirebon ini menyangkut 3 sektor, yaitu :

(1) Sektor Industri

Pada sektor industri, terdapat 2 PMA, dengan nilai investasi sebesar Rp. 137.575.000.000,00 dan menyerap sebanyak 892 tenaga kerja. serta 2 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 43.500.000.000,00 dan menyerap sebanyak 661 tenaga kerja.

(2) Sektor Perdagangan

Pada sektor perdagangan, terdapat 2 PMA, dengan nilai investasi sebesar Rp. 129.698.000.000,00 dan menyerap sebanyak 120 tenaga

kerja. serta 1 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.700.000.000,00 dan menyerap sebanyak 73 tenaga kerja.

(3) **Sektor Pariwisata (Perhotelan)**

Pada sektor pariwisata (perhotelan) terdapat 1 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 80.000.000.000,00 dan menyerap sebanyak 123 tenaga kerja.

2.1.4. Sosial Budaya Dan Politik

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan kondisi sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang mencerminkan peluang untuk hidup, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Melalui analisis IPM ini dapat dilihat gambaran tentang sejauhmana pemerintah Kota Cirebon telah mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas penduduknya.

Komponen IPM terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM Kota Cirebon selama kurun waktu 2003 - 2005 mengalami peningkatan dari 71 pada tahun 2003 menjadi 71,94 pada tahun 2004, dan tahun 2005 meningkat menjadi 72,52. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2004 - 2005 ini didorong oleh peningkatan semua komponen IPM. Peningkatan tertinggi adalah pada komponen daya beli yang meningkat sekitar 1,19 point, kemudian diikuti kenaikan angka rata-rata lama sekolah sekitar 0,51 point, selanjutnya Angka Melek Huruf (AMH) meningkat sebesar 0,34 point, dan Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat 0,07 point.

Secara umum perkembangan IPM Kota Cirebon dan komponennya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.4.
IPM KECAMATAN SE KOTA CIREBON
TAHUN 2006

| No | Kecamatan | Indeks | | | IPM |
|----|--------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | Kesehatan | Pendidikan | Daya Beli | |
| 1 | Harjamukti | 69,83 | 85,51 | 56,98 | 70,78 |
| 2 | Lemahwungkuk | 71,12 | 86,34 | 57,82 | 71,76 |
| 3 | Pekalipan | 68,63 | 87,01 | 58,19 | 71,28 |
| 4 | Kesambi | 73,83 | 88,29 | 59,00 | 73,71 |
| 5 | Kejaksan | 74,88 | 90,79 | 58,46 | 74,71 |

Sumber: BPS Hasil Pengolahan Survey IPM Kecamatan, 2006

Keseriusan Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan IPM terus dikembangkan melalui berbagai alternatif kebijakan yang langsung menyentuh lintas *stakeholders*. Salah satu upaya terobosan yang dilakukan pada Tahun 2006 adalah melalui keikutsertaan Kota Cirebon pada pelaksanaan Program Pendanaan Kompetisi, akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat (PPK-IPM). Dimana program ini merupakan suatu program pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten dan Kota terpilih yang bersifat kompetitif.

Tujuan digulirkannya PPK-IPM adalah untuk menerapkan pola pendanaan dengan misi tertentu (*mission budget*) yaitu akselerasi pencapaian IPM secara kompetitif, dengan memberikan insentif kepada para pelaksana program yang unggul dalam kinerjanya. Demikian pula untuk penentuan kegiatannya, secara keseluruhan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan pola kompetitif yang melibatkan lintas *stakeholders* tersebut, diharapkan fokus dari program PPK-IPM yang diarahkan pada peningkatan daya beli serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, akan menjadi faktor *katalis* terhadap program-program lainnya yang tengah diarahkan untuk mendukung peningkatan IPM Kota Cirebon.

Melalui program tersebut, Kota Cirebon telah keluar pula sebagai salah satu pemenang, dengan *reward* sebesar Rp. 25 milyar per tahun selama 2 tahun anggaran, yaitu Tahun 2006 dan Tahun 2007. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholders* yang ada di Kota Cirebon, termasuk dukungan dari DPRD Kota Cirebon.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Cirebon merupakan salah satu wujud nyata keseriusan Pemerintah Kota Cirebon meningkatkan IPM dalam bidang pendidikan. Selama tahun 2006 telah dilakukan pendataan bagi guru di 56 TK, 156 SD, dan 39 SMP. Pendataan ini diperuntukan sebagai pemutahiran data tenaga fungsional. Di samping pendataan guru, selama tahun 2006 juga dilakukan pendataan siswa di tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Adapun hasil pendataan siswa diketahui bahwa di 56 TK terdapat 3.636 siswa, di 156 SD terdapat 37.610 siswa dan di 39 SMP terdapat 16.886 siswa.

Penanganan Urusan Kesehatan juga merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Cirebon harus mampu memberikan pelayanan prima bidang kesehatan yang terjangkau masyarakat. Untuk itu Kota Cirebon telah menyediakan 305 (tiga ratus lima) Posyandu, 21 (dua puluh satu) Puskesmas dan 5 (lima) Rumah Sakit Umum, yang kesemuanya didukung oleh tenaga medis sebanyak 234 orang dan tenaga paramedis sebanyak 1045 orang.

2. Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) satu di antaranya diupayakan melalui pembangunan di bidang pendidikan, terutama melalui pendidikan formal. Sementara itu, untuk memajukan dunia pendidikan upaya yang dilakukan di antaranya meningkatkan prasarana dan sarana agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Cirebon merupakan salah satu wujud nyata dalam bidang pendidikan. Tahun 2005/2006 SD berjumlah 156, dengan jumlah guru sekitar 1.524 orang. SLTP berjumlah 39, dengan jumlah guru 967 orang, di tingkat SMU

jumlahnya 26 Sekolah mempunyai guru \pm 778 orang. Di Sekolah Kejuruan (SMK) sejumlah 16 Sekolah dengan jumlah guru 585 orang. Untuk sekolah sekolah keagamaan di Kota Cirebon tahun 2005/2006 MI berjumlah 17, dengan jumlah guru sekitar 199 orang. MTs berjumlah 9, dengan jumlah guru 190 orang, di tingkat MA jumlahnya 3 Sekolah mempunyai guru 120 orang.

Pada akhir tahun 2005, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,47 tahun dan Angka Partisipasi Murni SD 99,46 persen, SMP 92,06 persen, dan SMA 88,49 persen sementara Angka Putus Sekolah (APS) SD 126 siswa, SMP 207 siswa, SMA 369 siswa. Angka Melek Huruf (AMH) 96,89 persen; tiap tahun jumlah buta huruf usia 7 sampai 44 tahun di tiap-tiap Kecamatan se-Kota Cirebon terus mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2005 menyisakan 3.271 orang, terdiri dari 1.663 orang laki-laki dan 1.608 orang perempuan.

Kondisi di atas perlu menjadi bahan perhatian dimana angka putus sekolah dan angka buta huruf masih tergolong tinggi. Maka dengan demikian upaya pemberantasan buta huruf dan penanggulangan DO (putus sekolah) perlu lebih ditingkatkan.

3. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mencanangkan program Kota Cirebon Sehat pada tahun 2006, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan berbagai kebijakan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat akan menjadi lebih produktif. Dengan demikian secara tidak langsung pembangunan kesehatan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya dengan menyediakan prasarana dan sarana kesehatan, agar jangkauan pelayanan kesehatan makin meluas sehingga semua lapisan sosial-ekonomi masyarakat dapat dilayani dengan biaya yang terjangkau. Di sisi lain dilakukan pula penyuluhan

dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit dan pola hidup sehat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai jika tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, jaraknya dekat, dan biaya dapat terjangkau masyarakat miskin. Hingga tahun 2005 di Kota Cirebon telah tersedia sekitar 5 rumah sakit umum, 5 rumah sakit bersalin, 21 Puskesmas, 15 Puskesmas Pembantu, 13 Puskesmas Keliling, 75 Apotik, dan 34 Toko Obat, berikut dengan tenaga medis sekitar 58 dokter spesialis, 86 dokter umum, 26 dokter gigi, 609 perawat, dan 197 bidan.

Usaha membina kesejahteraan keluarga melalui perencanaan kelahiran merupakan upaya dari program keluarga berencana. Untuk mencapai tujuan tersebut telah di bentuk klinik-klinik KB untuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Jumlah petugas pelayanan keluarga berencana pada tahun 2005 yaitu PLKB/PKB sebanyak 31 orang, dokter 87 orang, dan 112 bidan. Mayoritas peserta KB menggunakan alat kontrasepsi suntik (17.196), pil (4.123) dan IUD (5.368). Tingkat prevalensi (perbandingan antara CU dengan PUS) rata-rata sekitar 72,85 persen tahun 2005.

Data mengenai tahapan keluarga sejahtera diperlukan sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap pembangunan di bidang kesejahteraan keluarga. Pada tahun 2005 keluarga berstatus pra sejahtera sejumlah 9.866 dari seluruh jumlah keluarga di Kota Cirebon, dan keluarga sejahtera tahap I mencapai 17.784. Sedangkan gabungan keluarga sejahtera II, III, III plus sekitar 37.900 keluarga.

4. Ketenagakerjaan

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, dengan harapan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk melihat sampai sejauh mana penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Dari data pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terungkap, bahwa pada tahun 2005 tercatat 6.894 orang pencari kerja yang mendaftar. Komposisi lulusan pendidikan pencari kerja terdaftar yang terbanyak adalah lulusan

SLTA/ sederajat sekitar 66,52 persen, kemudian lulusan Sarjana hampir 20 persen, dan D3 8,16 persen.

Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri untuk tahun 2005 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 20,51 persen, dari 8.673 orang (2004) menjadi 6.894 orang (2005). Apabila dilihat dalam periode 5 tahun kebelakang, terlihat gejala jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri menunjukkan *trend* peningkatan yang cukup nyata. Kondisi ini barangkali perlu menjadi perhatian semua pihak terutama instansi terkait, karena peningkatan ini bersamaan dengan tingginya tingkat pengangguran di negara kita.

Penduduk Kota Cirebon 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha utama pada akhir tahun 2005, sebagian besar (sekitar 41persen) bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran; 24 persen bekerja di sektor jasa-jasa; 9 persen pada sektor bangunan dan konstruksi; dan 8 persen pada sektor industri. Sisanya tersebar pada sektor angkutan dan komunikasi, pertanian, keuangan, pertambangan dan penggalian, serta listrik, gas, dan air minum.

Jumlah tenaga kerja tercatat hingga tahun 2005 laki-laki berjumlah 7.634 orang sedangkan perempuan berjumlah 5.301 orang. Melihat data dari dinas ketenaga kerjaan bahwa yang terdaftar sebagai pencari kerja (DPK) laki-laki berjumlah 3.551 orang sedangkan perempuan berjumlah 3.343 orang, sedangkan yang terserap oleh lapangan pekerjaan tenaga kerja laki-laki berjumlah 345 orang dan perempuan berjumlah 343 orang.

Jumlah perusahaan yang turut serta dalam program jamsostek dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2005, jumlahnya sudah mencapai 783 perusahaan dengan peserta yang aktif sebanyak 42.783 orang.

5. Agama

Jumlah pemeluk agama di Kota Cirebon sebagai berikut : Islam sebanyak 248,692 jiwa sedangkan sisanya tersebar pada penganut agama lain diluar Islam. Komposisi sarana tempat ibadah terdiri dari 216 mesjid, 18 gereja, 3 vihara, dan pura serta klenteng masing-masing satu. Jumlah jemaah haji yang berangkat pada tahun 2006 sebanyak 396 orang, terdiri dari 191 laki-laki dan 205 perempuan.

Kehidupan keagamaan di Kota Cirebon cukup kondusif dan dinamis, hal ini terlihat dari semaraknya peringatan hari-hari besar keagamaan.

6. Budaya

Kebudayaan yang ada di Kota Cirebon memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan serta diberdayakan menjadi bernilai tinggi yang lestari dan dapat dijadikan komoditas pariwisata sebagai daya tarik Kota Cirebon.

Kesenian, tradisi dan unsur-unsur nilai budaya yang amat luhur sebagai paktor penunjang dalam menyokong pembangunan di wilayah Kota Cirebon. Budaya yang cenderung religius berbaur dengan budaya keraton yang bernuansa kerajaan sangat khas dan amat menonjol sebagai ciri khas yang amat kental di Kota Cirebon.

7. Politik

Kondisi politik Kota Cirebon dapat tergolong cukup dinamis dan kehidupan partai politik dan organisasi massa sangat mendukung kehidupan politik di Kota Cirebon.

Kota Cirebon walaupun memiliki wilayah yang sangat sempit tetapi tensi politik dan persaingan politik cukup kuat, hal ini sebagai indikator bahwa potensi dan kemampuan serta tingkat melek politik masyarakat Kota Cirebon cukup tinggi.

2.1.5. Pemerintahan

1. Wilayah Administrasi pemerintahan

Kota Cirebon terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 22 Kelurahan, pembagian wilayahnya terdiri dari :

- (1) Kecamatan Kejaksan dengan luas 3,616 Km², terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Sukapura.
- (2) Kecamatan Kesambi dengan luas 8,059 Km², terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Kesambi, Kelurahan Drajat, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Pekiringan, dan Kelurahan Karyamulya.

- (3) Kecamatan Pekalipan dengan luas 1,561 Km², terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalangan, dan Kelurahan Jagasatru.
- (4) Kecamatan Lemahwungkuk dengan luas 6,507 Km², terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Pegambiran dan Kelurahan Panjunan.
- (5) Kecamatan Harjamukti dengan luas 17,615 KM², terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Larangan, Kelurahan Kecapi, dan Kelurahan Kalijaga.

2. Lembaga Legislatif

Jumlah anggota DPRD Kota Cirebon hasil Pemilu 2004 sebanyak 30 orang, dengan mayoritas tingkat pendidikan anggota DPRD adalah lulusan SLTA = 13 orang, kemudian terbanyak kedua lulusan S1 = 9 orang, dan lulusan S2 = 8 orang. Dari 30 orang anggota DPRD terdapat 2 orang perempuan yang bekerja di Komisi A dan Komisi B.

Kapasitas para anggota legislatif cukup memadai dan dapat dijadikan suatu modal dasar yang amat besar bagi pertumbuhan politik dan pembangunan di Kota Cirebon.

Perkembangan kehidupan dan kinerja legislatif sangat dinamis dibuktikan dengan keseriusan para anggota legislatif dalam mencermati berbagai persoalan yang berkembang di Kota Cirebon. Hak-hak para anggota legislatif sebagai manifestasi dan akumulasi kepentingan masyarakat amat dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Produk legislatif berupa pertimbangan kebijakan bagi eksekutif, berupa peraturan daerah, serta dalam bentuk pengawasan atau kontrol terhadap kinerja eksekutif sangat kelihatan. Meskipun demikian upaya-upaya meningkatkan kerjasama dalam percepatan pembangunan bekerjasama dengan eksekutif perlu lebih dikembangkan.

3. Lembaga Eksekutif

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon berjumlah 5.563 orang yang terdiri dari 3.005 laki-laki dan 2.558 perempuan. Pegawai Negeri Sipil ini terbagi kedalam berbagai unit

kerja yaitu Setda Kota Cirebon, DPRD dan Sekretariat KPU, Dinas-dinas, Kantor, Badan/Lembaga, Kecamatan/Kelurahan dan Perusahaan Daerah. Sementara itu, pejabat struktural berjumlah 626 orang dengan komposisi 482 laki-laki dan 144 perempuan. Sedangkan yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 2.852 orang dengan komposisi 1.136 laki-laki dan 1.716 perempuan.

Struktur Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11, 12, 13, dan 14 Tahun 2004, sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) Sekretariat Daerah | : 3 Asisten dan 11 Bagian |
| 2) Sekretariat DPRD | : 1 buah |
| 3) Dinas | : 12 buah |
| 4) Badan | : 4 buah |
| 5) RSUD | : 1 buah |
| 6) Kantor | : 6 buah |
| 7) Kecamatan | : 5 buah |
| 8) Kelurahan | : 22 buah |

Keberadaan struktur ini perlu lebih ditingkatkan kapabilitasnya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Koordinasi antar OPD (organisasi perangkat dinas) sangat penting untuk lebih meningkatkan produktivitas dan akselerasi pembangunan di Kota Cirebon.

2.1.6. Prasarana Dan Sarana Wilayah

Rencana struktur tata ruang meliputi rencana pengembangan sistem Bagian Wilayah Kota (BWK) dan rencana pengembangan prasarana dan sarana. Rencana pengembangan Sistem BWK pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi setiap BWK/Sub-BWK dalam mendukung pengembangan kota secara keseluruhan. Peningkatan peran dan fungsi BWK tersebut dilakukan dengan menetapkan elemen utama dan elemen penunjang di setiap BWK.

Elemen utama adalah jenis kegiatan yang secara dominan mewarnai kinerja pengembangan BWK. Dominasi ini dapat diukur dari luas area, skala pelayanan, maupun dampak tata ruang yang ditimbulkan.

Sedangkan elemen penunjang adalah elemen yang diharapkan dapat mendukung berkerjanya elemen utama dan atau keberadaannya sudah ada sejak dulu sehingga harus dipertahankan, meskipun tidak secara langsung mendukung elemen utama.

1. Transportasi

(1) Transportasi Darat

Tipologi prasarana jalan berdasarkan statusnya meliputi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota. Rincian status jalan tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Jalan Negara, meliputi Jalan Pilang, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Siliwangi Utara, Jalan Diponegoro, Jalan Samadikun, Jalan Benteng, Jalan Yos Sudarso, Jalan Kesunean, Jalan Kalijaga, dan Jalan By Pass (A. Yani – Dharsono).
- (b) Jalan Provinsi, meliputi ruas Jalan Kanggraksan dan Jalan P. Sudirman.
- (c) Jalan Kota, ruas-ruas jalan di luar Jalan Negara dan Jalan Provinsi.

Kota Cirebon memiliki 2 (dua) buah terminal angkutan, yaitu Terminal Bis Harjamukti dan Terminal Dukuh Semar. Terminal bis Harjamukti berfungsi sebagai simpul pergerakan untuk lalu-lintas antar kota dan antar propinsi, seperti : Sumatra – Jawa – Bali, DKI Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur, Banten – Bandung – Jawa Tengah. Sementara untuk Terminal Dukuh Semar berfungsi sebagai simpul pergerakan antar kota, seperti Cirebon – Plered, Gunungjati, Ciperna, Mundu, dan pergerakan dalam Kota Cirebon.

Kendaraan lintas regional seperti bis dan truk yang berasal dari wilayah DKI Jakarta pada umumnya langsung melintasi Jalan Tol Palimanan – Kanci, jalur Palimanan – Kedawung – By Pass – Jalan Kalijaga – Tegal, atau jalur Klayan – Jalan Diponegoro – Jalan Yos Sudarso – Jalan Kalijaga – Tegal.

Di samping itu, Kota Cirebon dilalui jalur Kereta Api lintas Jakarta--Surabaya melalui Semarang dan Yogyakarta. Kota Cirebon memiliki 2 (dua) buah Stasiun, yaitu Stasiun Kejaksan yang melayani angkutan dengan tarif non-ekonomi dan Stasiun Prujakan yang melayani tarif Ekonomi. Dalam

rancangan RPJP Jabar 2005—2025, akan dibangun jalur KA Bandung--Cirebon.

Jika keempat sarana transportasi darat ini terwujud, maka akan sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan di Kota Cirebon.

(2) Transportasi Laut

Kota Cirebon memiliki simpul transportasi laut, yaitu Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Cirebon terdiri atas 2 (dua) daerah lingkungan, yaitu Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan seluas ± 51 ha dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan seluas ± 25 ha. Adapun perairan pelabuhan seluas ± 8.410,91 ha.

Pelabuhan Cirebon memiliki fungsi sebagai berikut :

- (a) Melayani kebutuhan distribusi barang perdagangan, baik perdagangan dalam negeri/antar pulau maupun perdagangan internasional (ekspor-impor);
- (b) Menunjang pertumbuhan industri dan perputaran roda perdagangan daerah belakang dan sekitarnya;
- (c) Melayani lalu lintas angkutan penumpang laut yang melalui Cirebon pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya;
- (d) Mendorong peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan, dan Jawa Barat pada umumnya.

Adapun prasarana dan sarana penting yang ada di pelabuhan meliputi:

- (a) Terminal (Penumpang, Batubara, Minyak Curah, dan Kelapa Sawit);
- (b) Dermaga (Kolam Pelabuhan I, Kolam Pelabuhan I, Kolam Pelabuhan II, Kolam Muarajati, dan Kolam Khusus Pelra).
- (c) Gudang dan Lapangan Penumpukan
- (d) Alat Bongkar Muat
- (e) Pelayanan Air Kapal
- (f) Stasiun Radio Pantai
- (g) Kolam dan Alur Pelabuhan

Selain itu terdapat juga 1 (satu) buah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan dan 4 (empat) buah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Tradisional ; Kesenden, Sukalila, Cangkol, dan Kesunean. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan berfungsi untuk melayani kapal-kapal nelayan dengan tonase besar, sementara untuk kapal-kapal ukuran kecil pada umumnya mendarat di TPI Tradisional.

(3) Transportasi Udara

Kota Cirebon memiliki Bandar Udara Cakrabhuwana yang merupakan simpul pergerakan angkutan udara. Bandara Cakrabhuwana memiliki panjang landasan pacu ± 1.400 meter dan dapat didarati oleh jenis pesawat F-28.

Tahun 2006 telah dilakukan peningkatan konstruksi *run way* dengan anggaran bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Peningkatan *run way*/perpanjangan lebih dari 1.400 meter memerlukan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, pembangunan peningkatan *run way* ini memerlukan pendekatan kewilayahan, karena harus melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Jika pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka jadi dibangun, maka akan berdampak positif pula terhadap peningkatan pembangunan Kota Cirebon.

2. Perumahan/Permukiman

Gambaran tentang perumahan/permukiman meliputi sebaran kawasan perumahan, kondisi air bersih, drainase, limbah, dan persampahan.

(1) Sebaran Kawasan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Cirebon didominasi oleh penyediaan/pembangunan perumahan yang diusahakan oleh perusahaan pengembang (*developer*). Pada dekade 1980 – 1990-an, penyediaan perumahan oleh perusahaan pengembang dilakukan dalam skala yang relatif besar/luas, akan tetapi kecenderungan yang terjadi pada saat ini

pembangunan kawasan perumahan oleh perusahaan pengembang relatif kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan luas lahan.

(2) Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kota Cirebon dilayani oleh sistem jaringan pelayanan air bersih PDAM. Sumber air PDAM sendiri adalah dari sumber mata air Cipaniis, Kabupaten Kuningan dengan kapasitas debit air terendah adalah 797 liter per detik, sedangkan kapasitas debit tertinggi adalah 860 liter per detik.

Pelayanan air dari PDAM sebagian besar tersalurkan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 13.682.975 m³ atau 70,40 persen kemudian diikuti untuk toko, industri, perusahaan sebesar 2.458.926 m³ atau 12,65 persen.

Sebagian besar wilayah Kota Cirebon telah terlayani air bersih, kecuali wilayah-wilayah di bagian Selatan dengan kondisi topografi relatif tinggi, seperti Kelurahan Argasunya, Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Kecapi, dan Kelurahan Larangan.

Dalam melakukan pendistribusiannya sumber air tersebut dibagi menjadi dua menara persediaan (*reservoir*), selanjutnya disalurkan melalui jaringan primer dan sekunder yang langsung didistribusikan ke masing-masing kran umum (kolektif), dan saluran tersier (individu/rumah tangga).

Melihat kondisi di atas, Kota Cirebon memiliki potensi kerawanan terhadap tersedianya air bersih karena tergantung pada Kabupaten Kuningan, maka perlu adanya upaya untuk mencari potensi baru penyediaan air bersih dari sumber lain seperti pengolahan air laut menjadi air bersih.

Krisis air di Kota Cirebon merupakan salah satu masalah yang urgen untuk segera dipecahkan. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah air tersebut Pemerintah Kota Cirebon perlu mengadakan pendekatan kewilayahan yang melibatkan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon sendiri.

(3) Drainase

Berdasarkan hirarkinya, drainase di Kota Cirebon terdiri atas sistem primer, sekunder, dan tersier. Sistem primer mengalir melalui 4 sungai besar, yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga. Keempat sungai tersebut menampung air yang mengalir dari sistem sekunder (anak-anak sungai dan drainase lintas kawasan/eks CUDP) dan

saluran-saluran tersier.

Khusus untuk Sungai Sukalila merupakan drainase buatan yang tidak memiliki hulu seperti ketiga sungai yang lain (hanya menerima aliran dari beberapa sistem sekunder dan tersier).

(4) Limbah

Pemerintah Kota Cirebon memiliki 3 unit pengelolaan limbah, yaitu Kolam Oksidasi Kesenden, Taman Ade Irma Suryani, dan Perumnas (Burung dan Gunung). Namun hingga saat ini untuk Kolam Oksidasi Kesenden masih belum berfungsi secara optimal.

(5) Persampahan

Sistem pembuangan sampah dikelola oleh masyarakat dan Dinas kebersihan dan pertamanan. Yang bertanggungjawab pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga ke tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah masyarakat. Sedangkan dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tanggungjawab pemerintah.

Kota Cirebon memiliki ± 22 TPS tersebar di seluruh wilayah dan 1 TPA Kopi Luhur. Untuk mendukung sistem pelayanan persampahan pada saat ini beroperasi 9 buah *dump truck*, 10 buah *arm roll*, 1 buah *beckhoe*, 1 buah *track loader*, 1 buah *bulldozer* serta 75 buah *container* 12m³ dan 27 buah *container* kecil ukuran 10 m³.

3. Fasilitas Sosial/Umum

Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk suatu kota akan membawa dampak terhadap jumlah dan kebutuhan ruang untuk penyediaan fasilitas kota seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan lain-lain.

(1) Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan

kebijaksanaan.

Penyelenggaraan urusan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan tujuan meningkatnya kualitas pendidikan, serta untuk mencapai sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum “Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pendidikan. diselenggarakan kegiatan “Pelatihan Gugus MBS (pendamping bantuan UNICEF)”.

Sampai dengan akhir tahun 2004, Kota Cirebon memiliki 13 perguruan tinggi, 45 SLTA/MA/SMK, 50 SLTP/MTs/SLTP Terbuka, 171 SD/MI, 2 SLB, 20 RA, dan 50 TK.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kota Cirebon terdiri atas TK, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, Perguruan Tinggi dan berbagai Kursus atau Keterampilan. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan.

(2) Kesehatan

Perawatan kesehatan adalah sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit dan juga promosi kemakmuran mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan ditawarkan oleh profesional kedokteran. Penanganan Urusan Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Cirebon harus mampu memberikan pelayanan prima bidang kesehatan yang terjangkau masyarakat.

Kota Cirebon memiliki 305 (tiga ratus lima) Posyandu, 21 (dua puluh satu) Puskesmas dan 5 (lima) Rumah Sakit Umum, yang kesemuanya didukung oleh tenaga medis sebanyak 234 orang dan tenaga paramedis sebanyak 1045 orang. Puskesmas tersebar di hampir semua Kecamatan. Apotik terdapat di seluruh Kecamatan. Namun jumlah terbanyak berada di Kecamatan Pekalipan dan Lemahwungkuk.

Penyelenggaraan urusan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, serta untuk mencapai sasaran Meningkatkan derajat kesehatan yang ditandai dengan menurunnya jumlah bayi yang meninggal, menurunnya jumlah ibu melahirkan yang meninggal dan menurunnya jumlah balita gizi buruk.

(3) Peribadatan

Fasilitas peribadatan dikelompokkan berdasarkan penganut agama di Kota Cirebon yaitu Islam, Kristen, Budha. Fasilitas agama Islam dikelompokkan menjadi masjid, langgar, dan mushola. Jumlah fasilitas peribadatan terbanyak di Kota Cirebon adalah fasilitas peribadatan Islam (Mesjid). Untuk penyebaran fasilitas peribadatan Agama Islam dan Kristen hampir merata di seluruh wilayah Kota Cirebon kecuali untuk Vihara terdapat di Kecamatan Pekalipan dan Lemahwungkuk.

(4) Olahraga/Taman

Penyelenggaraan urusan Olahraga diarahkan untuk: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur budaya bangsa” dengan tujuan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”,

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum “Peningkatan prestasi olahraga”, Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan program “Pembinaan dan pengembangan keolahragaan”. Dalam mencapai program tersebut diselenggarakan kegiatan “Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA)”.

Kota Cirebon memiliki beberapa fasilitas lapangan olah raga yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan, disamping itu juga taman dan tempat bermain pada dasarnya merupakan fasilitas lingkungan.

(5) Permakaman

Kota Cirebon memiliki 10 Tempat Permakaman Umum (TPU). Kondisi beberapa TPU, khususnya yang ada di kawasan kota sudah mulai jenuh, seperti Kemlaten, Cigendeng, Jabang Bayi, Majasem, Drajat –1, Drajat-2, dan Sunyaragi.

Selain itu, ada juga makam-makam yang memiliki kekhasan dan nilai sejarah, seperti 1) Makam Batu Celek Keramat, 2) Makam Tan Sam Cai Kong - Pasar Pagi, 3) Makam Panjang Kesambi, 4) Makam Sunan Kalijaga, 5) Makam Ki Gede Dermayu Keboncai, 6) Makam Ki Kesek Pagongan Timur, 7) Makam Kesepuhan, 8) Makam Lawang Sanga, dan 9) Makam Keprabonan.

(6) Pemadam Kebakaran

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran, Pemerintah Kota Cirebon mempunyai pemadam kebakaran dengan jumlah 7 unit kendaraan dimana 6 unit adalah kendaraan pemadam kebakaran tanpa tangga dan 1 unit kendaraan yang menggunakan tangga. Dari jumlah tersebut 2 sudah tidak layak pakai. Dengan demikian, sarana pelayanan tersebut perlu pengadaan kembali.

(7) Perabot Jalan (*Street Furniture*)

Perabot jalan adalah komponen-komponen penunjang fasilitas kota sekaligus berfungsi estetika, misalnya; pot jalan, bak sampah jalan, *shelter*, *billboard*, dan rambu penunjuk jalan.

Secara umum komponen ini banyak tersebar di ruas-ruas jalan strategis, seperti Jalan Siliwangi, Jalan dr. Wahidin, Jalan Kartini, Jalan dr. Cipto MK, dan jalan-jalan lain di kawasan pusat kota.

Dari komponen tersebut yang masih tampak semrawut adalah *billboard*/papan reklame. Seringkali penempatan reklame tidak memperhatikan nilai-nilai estetika lingkungan.

4. Utilitas

(1) Jaringan Listrik

Suplai kebutuhan listrik di Kota Cirebon dipenuhi dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Cirebon. Klasifikasi pemakai energi listrik dibagi menjadi 5 macam penggunaan, yaitu untuk tujuan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan gedung pemerintah.

Daya terpasang pada tahun 2004 adalah sebesar 117.680,87 KVA dengan daya terpasang terbesar pada golongan tarif rumah tangga sebesar

53.624,85 KVA sedangkan daya terpasang terkecil terdapat pada penerangan jalan umum 1.544,32 KVA.

(2) Jaringan Telekomunikasi

Jenis fasilitas pelayanan telekomunikasi di Kota Cirebon adalah jaringan kabel telepon yang terbagi atas 3 bagian, yaitu jaringan kabel yang disambungkan untuk kebutuhan rumah tangga (perumahan), jaringan kabel yang disambungkan untuk kepentingan bisnis dan jaringan kabel yang dihubungkan untuk kebutuhan sosial.

Sejalan dengan pertumbuhan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat, di Kota Cirebon bermunculan penyedia jasa telekomunikasi non kabel yaitu yang disediakan oleh PT Telkom dan juga pihak swasta (Indosat, Telkomsel, dll).

(3) Jaringan Gas

Pada tahun 2004 kebutuhan gas Kota Cirebon terlayani oleh Perusahaan Gas Negara dengan jumlah sambungan 11.488 sambungan dimana sebagian besar pelanggan adalah untuk rumah tangga (98,20 persen). Sementara itu jumlah gas yang disalurkan sebanyak 40.938 m³.

5. Fasilitas Ekonomi

(1) Perdagangan

Aktivitas perdagangan di Kota Cirebon merupakan sektor yang dominan dibanding sektor ekonomi lainnya. Fasilitas perdagangan yang ada di Kota Cirebon pada prinsipnya terdiri atas 2 macam, yaitu : Perdagangan Modern dan Tradisional. Perdagangan modern terdiri dari Grage Mall, Cirebon Mall, Toko Alfa Gudang Rabat, Asia Toserba, Surya Toserba, Yogya Grand Centre, Yorga Lama, Sanitas Toserba, dan Gunungsari Toko Swalayan. Sedangkan Perdagangan tradisional terdiri dari : Pasar Kanoman, Pasar Jagasatru, Pasar Pagi, Pasar Gunungsari, Pasar Kramat, Pasar Drajat, Pasar Perumnas, dan Pasar Kalitanjung.

Sektor perdagangan ini menjadi salah satu faktor dominan yang sangat menunjang terhadap pencapaian percepatan ekonomi di Kota Cirebon. Prospek ke depan perlu ditunjang dengan peningkatan peluang investasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang mendukung perdagangan dan industri sekaligus jasa.

(2) Pariwisata

Kota Cirebon memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik berupa wisata alam maupun wisata buatan. Termasuk dalam kelompok wisata alam adalah Taman Kera/Makam Jaliyaga (2,00 ha). Wisata buatan adalah Taman Ade Irma Suryani (4,2 ha). Terdapat pula wisata budaya, yakni Keraton Kesepuhan (18,55 ha), Kraton Kanoman (17,55 ha), Kraton Kacirebonan (4,65 ha), dan Gua Sunyaragi (1,50). Potensi pariwisata Kota Cirebon ditunjang oleh pula ketersediaan fasilitas penginapan (hotel).

Sampai dengan akhir tahun 2004, terdapat 46 hotel dengan 1.526 kamar. Jumlah itu terdiri dari 7 hotel berbintang dengan 485 kamar dan 38 akomodasi lain dengan 1.041 kamar.

(3) Fasilitas Lain (Perbankan)

Pelayanan Jasa Perbankan di Kota Cirebon relatif lengkap. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral juga sudah ada sejak lama di Kota Cirebon. Bank Pemerintah maupun Swasta Nasional sudah memiliki kantor perwakilan / cabang di Kota Cirebon. Sampai akhir tahun 2004, terdapat 26 kantor cabang Bank Pemerintah maupun Swasta, 11 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas, dan 7 kantor unit, serta dilengkapi dengan 81 unit fasilitas ATM. Bank umum tersebut terdiri dari : Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Jabar, Bank Permata, Bank Central Asia, Bank International Indonesia, Bank Niaga, Bank Danamon, Bank Panin, Bank Buana Indonesia, Bank Lippo, Bank NISP, Bank Artha Graha, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Mega, Bank BTPN, Bank Djasa Artha, Bank Swaguna, Bank Haga, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Syariah.

2.1.7. Penataan Ruang

1. Aspek Perencanaan

Secara umum masalah-masalah yang termasuk dalam aspek perencanaan tata ruang adalah :

- (1) Keterbatasan dan atau keakuratan data / informasi seringkali menyebabkan kualitas hasil analisis dan rencana yang dihasilkan kurang sesuai dengan harapan.

- (2) Proses perencanaan tata ruang yang mengharuskan adanya pendekatan partisipatif (melibatkan banyak pihak) belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- (3) Perencanaan tata ruang dengan legalitas berupa Peraturan Daerah, di satu sisi menjadi produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sangat mengikat, akan tetapi di sisi lain bentuk legalisasi berupa seringkali menjadi kendala untuk melakukan langkah-langkah cepat guna mengimbangi cepatnya laju pertumbuhan dan perkembangan kota
- (4) Perencanaan tata ruang memiliki perspektif 3 (tiga) dimensi yang secara substansi harus mengakomodir penataan terhadap unsur **manusia, kegiatan, dan ruang** sebagai wadahnya. Konsekuensinya, hasil perencanaan harus bersifat fleksibel/tidak kaku. Akan tetapi di sisi lain; oleh karena fleksibilitasnya tersebut, seringkali membawa konsekuensi terhadap penerapan rencana yang seolah-olah tidak konsisten.

Hal terpenting dalam aspek perencanaan tata ruang adalah disesuaikan dengan pola perencanaan dari nasional dan regional serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta prediksi jangka panjang.

2. Aspek Pemanfaatan

Secara umum masalah-masalah yang termasuk dalam aspek pemanfaatan ruang adalah :

- (1) Jumlah penduduk yang semakin meningkat telah membawa konsekuensi pada tuntutan akan kebutuhan pemanfaatan ruang/lahan,
- (2) Penerapan Rencana Tata Ruang Kota seringkali lebih didominasi oleh perilaku pasar, akibatnya Pemerintah Daerah harus menerbitkan peraturan-peraturan baru di luar ketentuan yang tercantum dalam dokumen rencana tata ruang. Kondisi ini telah menimbulkan *image* di mata masyarakat tentang konsistensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan dokumen rencana tata ruang,
- (3) Dualisme kegiatan perkotaan, dimana tumbuh dan berkembang kegiatan-kegiatan yang bersifat modern selalu diikuti oleh kegiatan tradisional. Kondisi ini seringkali tampak di ariil pusat perbelanjaan dan sekitarnya,
- (4) Bentuk dan luas kota yang hanya 3.735,82 hektar telah membawa konsekuensi terhadap sulitnya mengendalikan dampak penduduk

komuter dari wilayah *hinterland* ke Kota Cirebon dan sebaliknya, antara lain :

- (a) Pergerakan penduduk wilayah *hinterland* ke Kota Cirebon telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk pada siang hari dalam jumlah yang sangat berarti.
- (b) Pergerakan angkutan becak, dimana Kabupaten Cirebon telah memiliki andil yang sangat besar dalam hal produksi angkutan becak sementara operasinya di Kota Cirebon
- (5) Keterbatasan lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi telah berdampak pada pemugaran bangunan-bangunan bersejarah,
- (6) Masih terdapat tanah-tanah aset Pemerintah Kota Cirebon yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon dan sebaliknya, khususnya di wilayah perbatasan,
- (7) Karakteristik Kota Cirebon yang memiliki pantai sepanjang ± 7 km telah menciptakan lingkungan permukiman nelayan yang mempunyai ciri-ciri kekumuhan,
- (8) Kota Cirebon secara geografis berada di dataran rendah dan dilalui oleh banyak sungai, termasuk sungai-sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, kondisi ini telah berdampak pada tingkat sedimentasi yang tinggi yang akibatnya adalah terbentuknya tanah-tanah timbul,
- (9) Pemanfaatan lahan-lahan kuburan di kawasan kota sudah relatif jenuh, sementara belum ada upaya kejelasan lokasi alternatif,
- (10) Terjadi kecenderungan pemanfaatan trotoar dan atau lahan-lahan kosong, baik yang berada di sekitar pusat perbelanjaan maupun di ruas-ruas jalan yang cukup strategis oleh pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang lainnya,
- (11) Masih ditemui lahan-lahan kosong yang terlantar sementara keberadaannya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, misalnya lahan kuburan Cina Penggung, lahan kawasan industri Pegambiran, dan lahan kawasan wisata bahari,
- (12) Rute kendaraan, baik pribadi maupun angkutan kendaraan umum (angkot) belum mencerminkan pola / sirkulasi pergerakan yang efisien dan efektif. Kondisi ini telah berdampak negatif, misalnya banyaknya pelanggaran-pelanggaran arah rute oleh khususnya angkutan becak,

- (13) Jumlah angkutan kota yang beroperasi dinilai jauh melebihi kebutuhan di lapangan, sehingga perlu dilakukan manajemen operasi (pengendalian kuota, peremajaan, atau pergantian jam operasi),
- (14) Terjadi kemacetan lalu-lintas di titik-titik strategis :
- (a) Di Sekitar Pusat Perbelanjaan, penyebabnya adalah kepentingan antara pebelanja vs angkutan kota vs angkutan becak vs kendaraan keluar masuk parkir vs PKL;
 - (b) Di Sekitar Pasar Tradisional, penyebabnya adalah kepentingan antara pebelanja vs angkutan kota vs angkutan becak vs pedagang klemprakan;
 - (c) Di Sekitar Fasilitas Pendidikan, penyebabnya adalah kepentingan antara siswa vs angkutan kota vs angkutan becak vs PKL;
 - (d) Di Persimpangan KA, penyebabnya adalah indiscipliner pengguna jalan, ditambah lebar jalan tidak memadai;
 - (e) Di persimpangan strategis, penyebabnya adalah pengaturan fase *traffic light* kurang optimal, lebar jalan kurang memadai;
 - (f) Di koridor perdagangan/ritel, penyebabnya adalah kepentingan antara pebelanja vs pengguna jalan vs kendaraan keluar masuk parkir di badan jalan.

3. Aspek Pengendalian

Secara umum masalah-masalah yang termasuk dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang adalah:

- (1) Pemasarakatan dokumen rencana tata ruang belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pemahaman masyarakat terhadap materi rencana tata ruang masih kurang;
- (2) Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana proses dan prosedur perijinan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (3) Sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang ada belum berjalan efisien dan efektif;
- (4) Belum ada sistem koordinasi antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon yang mampu menjamin keterpaduan dan kesinambungan

penataan ruang, khususnya di wilayah perbatasan, sehingga seringkali muncul konflik-konflik tata ruang di wilayah perbatasan;

- (5) Banyak ditemui pelanggaran terhadap garis sempadan, seperti sempadan pagar dan bangunan, sempadan sungai, sempadan pantai, dan sempadan rel kereta api; dan
- (6) Pemanfaatan potensi Galian C di Kelurahan Argasunya dinilai kurang memperhatikan norma-norma kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi atau komitmen seluruh *stakeholders* baik pengusaha, pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama berpegang teguh pada penataan ruang yang telah direncanakan.

4. Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi nyata dilapangan dengan melakukan deliniasi global terhadap citra satelit *quick bird* tahun 2002, Kota Cirebon terbagi habis dalam 2 (dua) peruntukan, yaitu ; kawasan /lahan terbangun dan kawasan/lahan kosong.

Kawasan/lahan terbangun pada prinsipnya terbagi habis untuk jenis penggunaan lahan seperti perumahan/permukiman, perkantoran/pemerintah, perdagangan/jasa, industri, perbengkelan/pergudangan, permakaman, ruang terbuka hijau (taman) dan lain-lain (prasarana jalan, drainase). Sedangkan kawasan/lahan non-terbangun pada umumnya masih berupa lahan-lahan kosong.

Berdasarkan *deliniasi* tersebut dapat diidentifikasi alokasi kawasan terbangun di Kota Cirebon seluas $\pm 2.039,96$ (53,54persen) dan kawasan non terbangun (lahan kosong) seluas $\pm 1.770,04$ (46,46 persen)

Perkembangan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa jenis penggunaan lahan di atas tidak selalu terpisah, akan tetapi hampir terjadi percampuran antara yang satu dengan yang lain (*mix use*). Kondisi semacam ini relatif menyulitkan penghitungan alokasi pada skala peta yang relatif kecil.

Kondisi umum penggunaan lahan di Kota Cirebon dapat digambarkan bahwa perumahan/permukiman memiliki luas yang paling besar, yaitu

seluas 1.368,55 ha (36,63 persen) dari luas seluruh kota. Sementara penggunaan lahan yang paling kecil adalah industri dan pergudangan/perbengkelan, masing masing seluas 60,14 ha (1,61 persen) dan 61,27 ha (1,64 persen).

2.2. ANALISIS SWOT

Sementara langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mencapai pembangunan Kota Cirebon berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6.

HASIL ANALISIS SWOT

| Rangking | Langkah Untuk Mewujudkan Visi |
|-----------------|---|
| 1 | Optimalisasi Pemanfaatan Ruang |
| 2 | Pelayanan aparatur yang prima |
| 3 | Penegakan hukum |
| 4 | Meningkatkan investasi swasta |
| 5 | Membudayakan etos kerja |
| 6 | Pemberdayaan masyarakat |
| 7 | Mewujudkan masyarakat yang bermoral baik dan religius |
| 8 | Meningkatkan kualitas SDM (Melalui Pendidikan) |
| 9 | Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan |

Berdasarkan pilihan responden tersebut, langkah awal yang harus dilakukan guna membangun Kota Cirebon adalah Optimalisasi Pemanfaatan Ruang dan peningkatan pelayanan aparatur pemerintah.

2. 2. 1. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki Kota Cirebon dapat dilihat dari hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 2.7.
ANALISIS KEKUATAN

| Rangking | Potensi Kota Cirebon utk Mewujudkan Visi |
|-----------------|---|
| 1 | potensi perdagangan & Industri serta Jasa |
| 2 | potensi SDM |
| 3 | potensi Sarana dan prasarana |
| 4 | potensi kelautan/perikanan |
| 5 | potensi wisata |

potensi perdagangan & Industri serta Jasa, SDM dan Sarana dan Prasarana merupakan kekuatan yang pantas untuk mendukung pembangunan Kota Cirebon.

2. 2. 2. Kelemahan yang Dimiliki

Sementara kelemahan yang dimiliki Kota Cirebon dapat dilihat pada hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 2.8.
ANALISIS KELEMAHAN

| Ranking | Kelemahan/permasalahan dlm Mewujudkan Visi Kota Cirebon |
|----------------|--|
| 1 | Konsistensi Pemanfaatan Ruang |
| 2 | Belum mantap dan lengkapnya perangkat hukum/perda |
| 3 | Investasi belum berkembang |
| 4 | Pelayanan Pemerintah Daerah yang masih belum optimal |
| 5 | Masih rendahnya daya beli masyarakat |
| 6 | Masih tingginya angka putus sekolah dan masih terdapatnya masyarakat yang buta huruf). |

Belum konsistennya Pemanfaatan Ruang serta belum mantapnya perangkat hukum atau perda dalam menata pembangunan merupakan kelemahan yang paling menonjol.

2. 2. 3. Peluang

Peluang yang dimiliki Kota Cirebon di masa yang akan datang berdasar hasil analisis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9.
ANALISIS PELUANG**

| Ranking | Peluang atau Prospek dlm Mewujudkan Visi |
|----------------|--|
| 1 | Posisi yang strategis |
| 2 | Peluang Investasi |
| 3 | Peluang pasar komoditas unggulan |
| 4 | Adanya otonomi daerah |
| 5 | Adanya kebijakan perdagangan bebas |
| 6 | Adanya kerjasama Pemerintah Daerah se-Jawa Barat |
| 7 | Meningkatnya harga komoditas industri unggulan |

Posisi strategis kawasan, peluang Investasi dan adanya peluang pasar komoditas unggulan serta adanya otonomi daerah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan wilayah Kota Cirebon untuk mencapai visi dan misinya.

2. 2. 4. Ancaman

Adapun ancaman utama yang dihadapi wilayah ini menurut hasil analisis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10.

ANALISIS ANCAMAN

| Rangking | Ancaman dalam Mewujudkan Visi |
|----------|---|
| 1 | Perdagangan bebas (regional, nasional dan internasional) |
| 2 | Persaingan antar daerah yang kurang sehat |
| 3 | perubahan kebijakan propinsi dan nasional |
| 4 | kondisi keamanan kawasan (rawan HIV, Flu Burung/ Pandemi Avian Influenza) |

Pelaksanaan perdagangan bebas dan daya saing daerah lain yang terus meningkat menyaingi Kota Cirebon merupakan ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu pembangunan Kota Cirebon harus senantiasa memperhatikan pendekatan kewilayahan, sesuai dengan perkembangan wilayah lain di sekitarnya.

Dari hasil analisis yang dilakukan lingkungan dan isu strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Cirebon secara rinci adalah:

1. Faktor Internal

(1) Profesionalitas dan proporsionalitas Sumber Daya Aparatur

Profesionalitas pegawai merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kota sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai fasilitator pembangunan. Profesionalitas pegawai akan membawa dampak yang besar bagi kinerja pemerintahan pada umumnya sehingga menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang dan sektor.

(2) Dukungan Anggaran

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan berjalan sesuai dengan harapan jika didukung oleh pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kota, Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Ketergantungan dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi dengan cara

meningkatkan potensi yang secara lebih terfokus dan profesional melalui intensifikasi penerimaan sumber perpajakan serta retribusi daerah tanpa menciptakan beban tinggi bagi masyarakat maupun sektor swasta

(3) Perusahaan Daerah

Keberadaan Perusahaan Daerah harus diupayakan menjadi salah satu pelaku ekonomi daerah yang dapat mendayagunakan aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai penyedia pelayanan publik dengan menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.

(4) Kapasitas Legislatif Daerah.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif perlu diupayakan seoptimal mungkin, sebab arah dan kebijakan riil pembangunan yang dilaksanakan sangat tergantung pada kebijakan eksekutif dan legislatif, Dunia usaha masyarakat sipil, sehingga dengan demikian perlu mengintensifikan dialog rutin (komunikasi/koordinasi yang sehat dan bermutu) untuk membahas permasalahan dan percepatan pembangunan.

(5) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan dilakukan untuk menemukan format struktur organisasi perangkat daerah yang “hemat struktur kaya fungsi” dan lebih sesuai bagi kebutuhan pembangunan daerah serta menghilangkan duplikasi dan tumpang tindih kewenangan antar unit kerja.

(6) Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai dalam pemerintahan mutlak diperlukan. Citra Pemerintah sangat besar ditentukan oleh disiplin aparatur, karena disiplin kerja aparat sangat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah. Melalui disiplin kerja tinggi, dengan sendirinya efektivitas dan efisiensi pun tinggi, sekaligus akan tercermin pada kinerja pegawai dan pemerintah secara keseluruhan.

(7) Fasilitas perkantoran, perdagangan, jasa dan hiburan

Fasilitas perkantoran, perdagangan, jasa dan hiburan yang ada di Kota Cirebon merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon. Pada umumnya fasilitas-fasilitas perkantoran, perdagangan dan hiburan berada di wilayah pusat kota. Seluruh fasilitas sosial

tersebut tidak hanya melayani masyarakat Kota Cirebon saja tetapi juga menjadi pusat tujuan masyarakat seluruh Wilayah Cirebon, Indramayu dan sekitarnya

(8) **Koordinasi**

Koordinasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu, koordinasi baik antara satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon serta *stakeholders* perlu ditingkatkan.

2. Faktor Eksternal

(1) Adanya kewenangan yang diberikan berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan potensi bagi Pemerintah Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya undang-undang tersebut akan memberikan peluang untuk mandiri dalam berbagai bidang sehingga akan terwujud cita-cita sesuai diharapkan masyarakatnya. Disamping kedua Undang-undang tersebut, keberadaan Peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah juga merupakan potensi yang sangat penting karena sebagai pedoman bagi pencapaian kegiatan Pemerintah Kota Cirebon.

(2) **Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan untuk terjadinya saling mendukung pemerintah dengan masyarakat dan mempercepat pelaksanaan pembangunan.

(3) **Keamanan dan ketertiban umum**

Keamanan dan ketertiban umum sangat mendukung dalam berjalannya proses pembangunan, pemerintahan dan perekonomian. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum disegala sektor terus dioptimalkan sehingga program dan kegiatan Pemerintah Kota Cirebon dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

- (4) Keberadaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Sebagai media berhimpunnya Pemerintah Kota mempunyai peran yang sangat strategis dan menyuarakan aspirasi kepada pemerintah pusat dalam memecahkan permasalahan perkotaan dan mengantisipasi tantangan kelembagaan dalam perkembangan Kota dimasa depan.
- (5) Letak geografis Kota Cirebon yang strategis
Letak Geografis Kota Cirebon sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan perekonomian. Hal ini akan berdampak pada penerapan *Core Business* di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini akan menambah strategis jika ditunjang oleh pembangunan KA Bandung—Cirebon; jalan tol Cisundawu-Cikampek-Cirebon-Kanci-Pejagan; dan pembangunan Bandara Internasional Kertajati.
- (6) Potensi wisata budaya
Potensi wisata budaya yang dimiliki Kota Cirebon sangat berpeluang dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga sangat diperlukan pengelolaan potensi wisata budaya secara optimal
- (7) Kesadaran hukum masyarakat
Masih terbatasnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang produk hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kecenderungan pelanggaran terhadap produk hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk mewujudkan masyarakat Kota Cirebon yang tertib hukum.
- (8) Penduduk miskin
Jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Cirebon. Untuk itu efektifitas dan efesiensi penanganan pengentasan keluarga miskin perlu ditingkatkan.
- (9) Prasarana dan sarana dasar kota
Pembangunan jalan tol, peningkatan jalur jalan kereta api, dan lain sebagainya, merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (10) Kerja sama Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak swasta
Kerja sama Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak swasta sangat penting dalam rangka meningkatkan upaya pelibatan swasta untuk

berpartisipasi dalam menanggulangi permasalahan–permasalahan sosial, ekonomi, dan pembangunan.

- (11) Kesepahaman antara pengusaha, buruh/pekerja, dan pemerintah Jalinan komunikasi dan kesepahaman antara pengusaha, buruh/pekerja dan Pemerintah dapat menciptakan stabilitas daerah yang kondusif
- (12) Perkembangan teknologi informasi
- (13) Perkembangan sarana/prasarana komunikasi
- (14) Pluralisme demokrasi (banyak pilihan)
- (15) Penduduk tua meningkat
- (16) Pendidikan meningkat
- (17) Perubahan iklim (pantai)
- (18) Pola kehidupan masyarakat yang meliputi pergaulan yang semakin tidak kondusif, etika yang mulai banyak dilanggar, dan selera yang beragam

2.3. PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA CIREBON

Untuk lebih lengkapnya prediksi kondisi umum Kota Cirebon untuk 20 tahun ke depan dapat dilihat sebagai berikut :

2.3.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Dalam hal kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kota Cirebon dalam 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan dengan perolehan nilai tambah yang optimal bagi kepentingan negara dan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.
- (2) Tercapainya peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Tersedia dan terkelolanya fasilitas air bersih yang dapat dikelola dengan maksimal dengan pemanfaatan potensi yang ada di Kota Cirebon.
- (4) Adanya perubahan iklim

2.3.2. Demografi

Dalam 20 tahun mendatang, tantangan dalam pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk adalah menciptakan penduduk tumbuh seimbang sehingga terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal yang harus ditunjukkan dengan tingginya tingkat tabungan masyarakat yang dapat diinvestasikan untuk peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing. Tantangan lainnya berkaitan dengan upaya persebaran dan mobilitas penduduk.

Di Kota Cirebon tingkat kepadatan penduduk sudah tinggi dan persebaran penduduk masih kurang merata, mereka masih banyak terpusat di pusat perkotaan yang memiliki sarana dan prasarana kehidupan yang lebih memadai. Tantangan lainnya adalah belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Penduduk umur tua bertambah yang mempunyai konsekuensi logis terhadap masa kerja dan pemeliharaan kesempatan kerja.

Perkembangan jumlah penduduk selama periode 1997-2006 (9 tahun) semula sebanyak 253.547 jiwa menjadi 285.363 jiwa atau ada kenaikan sebesar 31.816 jiwa (11,1persen) Jika dirata-ratakan dalam rentang waktu 9 tahun penduduk bertambah rata-rata 11, 1persen maka pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk sebanyak 348.995 Jiwa. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1, 32persen.

Jumlah penduduk miskin selama tahun 2003 s/d 2006 sebesar 5,13persen s/d 5,09persen dari jumlah penduduk, Maka diperkirakan tahun 2025 prosentase jumlah penduduk miskin sebesar 3persen s/d 4persen dari jumlah penduduk.

2.3.3. Ekonomi dan Sumber daya Alam

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon selama periode 2003 s/d 2006 berkisar antara 4,27persen s/d 5,54persen maka diperkirakan LPE kota Cirebon selama periode tahun 2005 s/d 2025 berkisar antara 5 persen s/d 7persen.

Perekonomian 20 tahun yang akan datang dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan Masyarakat Kota Cirebon sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan strategis daerah di dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi masyarakat.

1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana perdagangan, industri dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
2. PDRB Perkapita selama periode 2001 s/d 2006 yaitu 16,32 juta s/d 18,70 juta pertahun dengan pertumbuhan pendapatan perkapita antara 0,20persen s/d 1,64persen, maka diperkirakan pada tahun 2025 pendapatan perkapita berkisar 54 juta s/d 60 juta pertahun (berkisar US\$ 6000) dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin berkisar 3 persen s/d 4 persen dari jumlah penduduk.

Perekonomian 20 tahun yang akan datang dikembangkan berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) ilmu pengetahuan dan teknologi; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan sumberdaya sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Struktur perekonomian 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon diperkuat dengan mendudukkan sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai motor penggerak yang menghasilkan produk-produk secara produktif, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif,

yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Untuk 20 tahun yang akan datang peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah kegiatan sektor industri, perdagangan dan jasa didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara lokal. Kepentingan ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan kota, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan ketahanan pangan. Penyelenggaraannya yang terencana secara cermat akan menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi.

Sektor keuangan di Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui: implementasi sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan Indonesia, peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan daerah. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perbaikan pengelolaan keuangan daerah 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Pembangunan ekonomi di Kota Cirebon dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. **Pertama** Melalui keunggulan komparatif dengan wawasan, kemampuan, dan daya kreasi yang tinggi, serta memiliki sarana dan prasarana yang cukup

lengkap, basis keunggulan kompetitif industri dalam 20 tahun mendatang Kota Cirebon dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

- (1) Pengembangan industri dan jasa yang mengolah secara efisien dan rasional sumber daya, dengan memperhatikan daya dukungnya;
- (2) Pengembangan industri dan jasa yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; dan
- (3) Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri dan jasa ke depan.

Kedua dengan prinsip tersebut, fokus pengembangan industri dan jasa di Kota Cirebon dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada 4 (empat) pilar utama,

- (1) Industri yang berbasis pengolahan hasil pertanian dan kelautan;
- (2) Industri dan jasa transportasi;
- (3) Industri teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi (telematika), dan
- (4) Basis industri manufaktur dan obat-obatan yang potensial dan strategis untuk perkuatan daya saing industri ke depan.

Di Kota Cirebon dalam 20 tahun kedepan peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor industri dan jasa dalam arti luas dikelola dengan berbasis pengembangan hasil agribisnis/agro industri dan hasil kelautan yang dinamis dan efisien. Tujuan ini perlu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumberdaya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat kota pada umumnya, upaya ini bermanfaat di dalam menciptakan diversifikasi industri, perdagangan dan jasa yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian kota. Perhatian perlu diberikan kepada peningkatan kesejahteraan pengusaha kecil dan nelayan, pengembangan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan secara terarah serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.

Sistem ketahanan pangan di Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang harus dibangun sampai pada kemampuan kerjasama dengan daerah lain di sekitar Kota Cirebon untuk menjaga kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Di Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang perdagangan dan investasi dikembangkan agar mampu mendukung perkuatan daya saing regional dan global. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat efisiensi sistem perdagangan daerah/Provinsi; memperkuat posisi daerah dalam aktivitas perdagangan serta berbagai forum kerjasama perdagangan global, regional, dan plurilateral; pengembangan citra produk daerah yang berkualitas nasional dan internasional; dan mampu mendorong integrasi kegiatan ekonomi daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Sementara itu, investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, serta selaras dengan fokus peningkatan daya saing perekonomian kota.

Dalam Bidang Jasa, 20 tahun yang akan datang termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik nasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM di kota dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi Kota Cirebon, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan kota dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian.

Bidang Kepariwisata 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon dikembangkan agar mampu mendorong peningkatan daya saing perekonomian kota, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan Kota Cirebon dan potensi daerah sebagai wilayah kota dan bahari yang strategis serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah dan nasional.

Pengembangan UKM dan Koperasi 20 tahun yang akan datang diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UKM menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi pengolahan hasil agribisnis dan agroindustri, serta hasil kelautan khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan kota. Koperasi dikembangkan semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kelembagaan ekonomi 20 tahun yang akan datang dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governmen*) di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi kota; dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi.

Kebijakan pasar kerja 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan

perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

2.3.4. Sosial Budaya dan Politik

Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas SDM membaik yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat. Namun demikian, kualitas SDM Kota Cirebon dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sudah tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia. Tingginya kualitas SDM menyebabkan tingginya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi dan merupakan peluang besar dalam menata Cirebon 20 tahun mendatang.

Pembaruan peraturan perundang-undangan atau Perda terus-menerus dilakukan melalui penggantian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah lama maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon. Penyempurnaan struktur hukum dilakukan melalui pemberdayaan berbagai kelembagaan hukum, sedangkan peningkatan budaya hukum dilakukan melalui berbagai pendidikan, sosialisasi maupun berbagai upaya pemberian keteladanan pada masyarakat luas.

Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan agar Kota Cirebon menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon diarahkan untuk penguasaan dan pemanfaatan IPTEK bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEK yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Cirebon.

Pembangunan IPTEK dalam 20 puluh tahun mendatang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan, serta meningkatkan jumlah perolehan hak patent. Dukungan tersebut dilakukan melalui peningkatan kuantitas, kualitas, dan mobilitas SDM IPTEK, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEK lintas sektor, perumusan agenda riset nasional selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEK, penguatan sistem inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antar lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha, penumbuhan industri baru berbasis produk litbang, peningkatan kesadaran industri pada standar mutu produk berbasis sistem pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu (*measurement, standardization, testing, and quality/MSTQ*)

2.3.5. Prasarana dan Sarana Wilayah

Dari ketersediaan infrastruktur di Kota Cirebon, mencakup transportasi, ketenagalistrikan dan energi, telematika. Dalam kaitan itu, pembangunan infrastruktur diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut.

Tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, khususnya pelabuhan, lapangan terbang, dan jalan raya dalam sistem jaringan inter dan antar-daerah, baik antar Provinsi dengan tingkat keselamatan, jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar nasional bahkan internasional.

Pemenuhan pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan kebutuhan tenaga listrik termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi industri dan rumah tangga dapat terpenuhi; tercapainya tingkat efisiensi yang memuaskan baik sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi; terwujudnya sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada energi terbarukan, panas bumi, nuklir, dan energi fosil non BBM; serta terciptanya industri penunjang ketenagalistrikan dalam negeri yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem kelistrikan kota.

Meningkatnya penyelenggaraan jasa pengiriman barang dan telematika yang efisien guna meningkatkan kesiapan dan kemampuan masyarakat kota dalam memanfaatkan jasa pengangkutan dan informasi sehingga tercipta masyarakat informasi daerah yang berdaya saing dan mampu mengatasi dan memanfaatkan arus globalisasi.

Terwujudnya pengolahan sumber daya air yang mampu menjaga berkelanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas; dan terwujudnya pengendalian daya rusak air yang mampu melindungi keselamatan jiwa dan harta benda penduduk Kota Cirebon.

2.3.6. Pemerintahan

Manajemen pemerintahan di Kota Cirebon saat ini lebih menitikberatkan pada penyediaan pelayanan prima kepada rakyat yang kondisinya sudah semakin maju dan berkembang. Oleh karena itu jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan. Hak-

hak masyarakat dalam pelayanan publik, sebagai mandat UUD 1945, perlu diberikan secara penuh meskipun negara melalui pemerintah kota tidak memiliki cukup sumber daya yang memadai.

Saat 20 tahun kedepan, birokrasi di Kota Cirebon sudah banyak mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan yang dihadapi pada masa-masa lalu perlu terus menerus dapat diselesaikan. Maka pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan negara yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan amat perlu dikembangkan terus. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh: *desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi*.

Peranan pemerintah daerah 20 tahun akan datang yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan pembangunan Kota Cirebon.

2.3.7. Penataan Ruang

Setelah memperhatikan analisis di atas maka tata ruang di Kota Cirebon perlu segera dibenahi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tantangan yang ada saat ini sebagaimana tertuang dalam RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) Kota Cirebon yang dijalankan secara konsisten. Sehingga upaya penataan tata ruang ini dapat menjadi implementasi dari tujuan pembangunan Kota Cirebon.